

## Abstrak

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sangat penting perannya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran suatu daerah dengan menyumbangkan pendapatan atau kontribusi pada kas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XI/2013, tentu memberikan dampak yang sangat besar bagi sistem penyediaan air, tujuan dari penelitian untuk mengetahui pengaturan dan pengelolaan Sumber Daya Air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Yogyakarta, metode penelitian hukum normatif, hasil dari penelitian ini ialah konsep pengelolaan harus tetap mengacu Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, dengan prioritas oleh BUMN atau BUMD. Serta PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta dalam menjalankan usahanya telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Kota Yogyakarta dan PP No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Hak Menguasai Negara, BUMD

## Abstrac

*Regionally Owned Enterprises (BUMD) play a very important role in realizing the prosperity and prosperity of an area by contributing income or contributing to the Regional Original Revenue (PAD) cash. After the Constitutional Court Decision Number: 85 / PUU-XI / 2013, certainly had a very big impact on the water supply system, the purpose of the research was to find out the regulation and management of Water Resources in the Municipal Water Company (PDAM) of the City of Yogyakarta, legal research methods normative, the result of this research is that the management concept must still refer to Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution, with priority by BUMN or BUMD. As well as the Yogyakarta City Tirtamarta PDAM, in running its business, it is in accordance with Regional Regulation No. 14 of 2012 concerning the Yogyakarta City Tirtamarta Water Supply Company and PP No. 54 of 2017 concerning Regional-Owned Enterprises.*

*Keywords: Constitutional Court Decision, Right to Control Country, BUMD.*